

Peluang Besar Dari Abang Sam

Tanggal : Rabu , 04 November 2020

Media : Koran Tempo

Halaman : 9

Wartawan : Larissa Huda

Muatan Berita : Netral

Narasumber : Kasan Muhri (*Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan* (Kemendag)), Muhammad Lutfi (*Dubes RI Untuk AS*), Shinta Widjaja Kamdani (*Wakil Ketua Apindo*), Benny Soetrisno (*Ketua Umum GPEI*)

Rubrik : Bisnis

Topik :

Peluang Besar dari Abang Sam

Indonesia bisa mengisi pasar ekspor yang ditinggalkan Thailand, India, dan Turki.

Larissa Huda

larissahuda@tempo.co.id

JAKARTA — Indonesia kini menjadi satu-satunya negara di Asia yang masih menerima fasilitas *generalized system of preference* (GSP) dari Amerika Serikat. Perpanjangan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan AS pada 30 Oktober lalu itu membuka peluang bagi peningkatan volume ekspor Indonesia. Apalagi Amerika telah menghapus sebagian atau seluruh fasilitas GSP untuk mitra dagang regional lainnya, seperti India, Turki, dan Thailand.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Kasan Muhri, mengatakan, dihapuskan nya fasilitas GSP untuk Thailand, India, dan Turki memperbesar peluang Indonesia meningkatkan volume ekspor produk-produk yang selama ini dipasok oleh tiga negara tersebut. "Terutama elektronik, furnitur, dan produk karet," kata Kasan kepada *Tempo*, kemarin.

Selain GSP, Kementerian Perdagangan menem-puh beberapa jalan lain untuk mendorong ekspor, di antaranya membangun komunikasi dengan pemerintah AS untuk menangani

hambatan perdagangan, serta mendorong relokasi industri AS dari Cina ke Indonesia. Selain itu, Kementerian Perdagangan mengkaji kemungkinan perundingan dagang bilateral untuk mendapatkan akses pasar yang lebih baik.

Duta Besar RI untuk AS, Muhammad Lutfi, mengatakan penghapusan fasilitas GSP membuat Thailand kehilangan 804 pos tarif senilai US\$ 2,4 miliar. Total pos tarif tersebut, ujarnya, sama dengan 50 persen fasilitas yang dinikmati Thailand selama ini. Lutfi menyebutkan, pos tarif yang tidak lagi mendapatkan fasilitas GSP di tiga negara tersebut adalah



Pekerja merakit alat rumah tangga jenis setrika di PT Selaras Citra Nusantara Perkasa, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat, Oktober 2019.

produk suku cadang otomotif, panel elektronik, porselen, perhiasan, dan konsentrat sari buah.

"Saya melihat ini akan memperkuat ekspor berbasis industri, seperti industri otomotif. Kita juga bisa melihat (potensi pertumbuhan ekspor) industri porselen atau *holloware* (peralatan makan) sangat baik," ujar Lutfi.

Selain itu, Lutfi menambahkan, eksportir bisa memanfaatkan peluang dari sanksi yang diberikan kepada Vietnam akibat tuduhan memanipulasi nilai mata uang dan perdagangan kayu ilegal. Melihat situasi ini, ia optimistis Indonesia bisa menggenjot volume ekspor furnitur. "Dalam 1-2 tahun mendatang ekspor furnitur akan tumbuh hebat sekali akibat tuduhan pada Vietnam," ujar Lutfi.

Tak hanya GSP, kata dia, Indonesia akan meningkatkan kerja sama ekonomi dengan mengajukan skema *limited trade deal* (LTD). Menurut dia, pemerintah

tengah menyusun surat kepada United States Trade Representative AS untuk melakukan negosiasi. Pada skema LTD, tarif bea masuk produk yang ada dalam GSP dapat dijadikan nol secara permanen. Selain itu, tarif bea masuk produk di atas 10 persen dapat dipangkas sebesar 50 persen. "Kami menawarkan (skema) 5+7+5, yaitu lima produk ekspor utama, tujuh produk potensial, dan lima produk strategis," ujar Lutfi.

Adapun lima produk ekspor utama adalah pakaian, karet, alas kaki, elektronik, dan furnitur. Kemudian tujuh produk potensial adalah produk kayu, *travel goods*, produk kimia terutama yang berbasis sawit, perhiasan, mainan, rambut artifisial, dan kertas. Sedangkan lima produk strategis yaitu produk mesin, plastik, suku cadang otomotif, alat optik dan medis, serta produk kimia organik.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan In-

dustri Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Widjaja, mendukung rencana tersebut. Menurut dia, fasilitas GSP bersifat preferensi dagang unilateral, yang artinya bisa diberikan dan dicabut kapan saja oleh negara pemberi fasilitas.

Ia berpendapat bahwa Indonesia dan AS perlu mengembangkan cara lain untuk menciptakan skema preferensi dagang yang memiliki tingkat kepastian lebih tinggi dan permanen. "Kami mendukung bila Indonesia dan AS mengembangkan skema kerja sama perdagangan yang baru secara bilateral, di samping GSP," ujar Shinta.

Ketua Umum Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia Benny Soetrisno menilai skema LTD belum sekuat perjanjian dagang bebas (FTA) atau persetujuan kemitraan ekonomi yang komprehensif (CEPA). "Perjanjian ini (FTA dan CEPA) bea masuknya bisa nol persen. Ini yang dilakukan Vietnam," ujar Benny. ●